

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada bab kedua akan diuraikan mengenai landasan teoritis menjelaskan teori-teori yang melandasi kerangka pemikiran dalam mendukung perumusan hipotesis, yang didukung dengan penelitian terdahulu. Setelah itu membahas kerangka pemikiran teoritis yang menjelaskan tentang model dan hubungan antar variabel yang akan diteliti, sehingga timbul adanya hipotesis (dugaan awal penelitian).

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

2.1.1.1 Pengertian Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu indeks komposit yang juga merupakan indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara terukur dan *representative*. Indeks Pembangunan Manusia diperkenalkan pertama kali pada tahun 1990 oleh *United Nation Development Programme* (UNDP). Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran perbandingan dari angka harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia.

Konsep pembangunan manusia adalah pembangunan yang dilakukan mengutamakan pada pembangunan sumber daya manusia yang bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sumber daya manusia secara fisik dan mental mengandung makna meningkatkan daya serap dasar penduduk yang kemudian akan

memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu parameter untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia pada suatu wilayah Mahroji (2019).

Indeks Pembangunan Manusia adalah komponen pembangunan melalui pemberdayaan penduduk yang menitikberatkan pada peningkatan dasar manusia. Pembangunan yang dihitung menggunakan ukuran besar kecilnya angka pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Semakin tinggi angka yang diperoleh maka semakin tercapai tujuan dari pembangunan. Pembangunan adalah sebuah proses untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik Baeti (2013). Sebagai ukuran kualitas hidup, Indeks Pembangunan Manusia dibangun melalui pendekatan tiga dimensi mendasar. Dimensi tersebut meliputi kesehatan yang baik dan umur panjang; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki implikasi yang sangat luas karena berkaitan dengan banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup saat lahir. Selain itu, untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan kombinasi indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Dalam dimensi mengukur kehidupan yang layak, indikator daya beli masyarakat digunakan untuk beberapa kebutuhan pokok makanan dan non makanan, yang dapat dilihat pada besaran rata-rata pengeluaran perkapita, sebagai alat pendapatan yang mewakili pembangunan untuk mencapai kehidupan yang layak (BPS, 2023).

2.1.1.2 Komponen Pembangunan Manusia

Lembaga *United Nations Development Programme* (UNDP) telah mempublikasikan laporan pembangunan sumber daya manusia dalam ukuran kuantitatif yang disebut *Human Development Indeks* (HDI). Meskipun HDI merupakan alat ukur pembangunan sumber daya manusia yang dirumuskan secara konstan, diakui tidak akan pernah menangkap gambaran pembangunan sumber daya manusia secara sempurna.

Adapun indikator yang dipilih untuk mengukur dimensi HDI adalah sebagai berikut: (UNDP, Human Development Report 1993: 105-106)

1. Indeks Harapan Hidup (*Longevity*)

Diukur dengan variabel harapan hidup saat lahir atau *life expectancy of birth* dan angka kematian bayi per seribu penduduk atau *infant mortalityrate*.

2. Indeks Pendidikan (*Educational Achievement*)

Diukur dengan dua indikator, yakni melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas (*adult literacy rate*) dan tahun rata-rata bersekolah bagi penduduk 25 tahun ke atas (*the mean years of schooling*).

3. Akses terhadap Sumber Daya (*Access to resource*)

Dapat diukur secara makro melalui PDB riil perkapita dengan terminologi *purchasing power parity* dalam dolar AS dan dapat dilengkapi dengan tingkatan angkatan kerja.

2.1.1.3 Pengukuran Indeks Manusia

Indeks Pembangunan Manusia terdapat tiga komposisi indikator yang digunakan untuk mengukur besar indeks pembangunan manusia suatu negara, yakni:

1. Tingkat kesehatan diukur harapan hidup saat lahir, tingkat kematian bayi).
2. Tingkat pendidikan diukur dengan angka melek huruf (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga).
3. Standar kehidupan diukur dengan tingkat pengeluaran perkapita per tahun.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan rata-rata dari ketiga komponen tersebut, dengan rumus:

$$IPM = (X_1 + X_2 + X_3) / 3$$

Keterangan:

X_1 = indeks harapan hidup

X_2 = Tingkat Pendidikan

X_3 = standar hidup layak yang menggunakan indikator kemampuan daya beli.

Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut:

1. Dimensi Kesehatan

$$I = \frac{AHH - AHH_{MIN}}{AHH_{max} - AHH_{min}}$$

Keterangan:

- I = Indeks angka harapan hidup
- AHH = Angka harapan hidup
- AHH_{min} = Angka harapan hidup terendah
- AHH_{max} = Angka harapan hidup tertinggi

2. Dimensi Pendidikan

$$I = \frac{IHLS + IHRS}{2}$$

Keterangan:

- I = Indeks komponen
- HLS = Harapan lama sekolah
- RLS = Rata-rata lama sekolah

3. Dimensi pengeluaran (ekonomi)

$$I = \frac{P - P_{min}}{P_{max} - P_{min}}$$

Keterangan:

- I = Indeks pengeluaran
- P = Angka Pengeluaran
- P_{min} = Angka pengeluaran terendah
- P_{max} = Angka pengeluaran tertinggi

2.1.1.4 Teori Indeks Pembangunan Manusia

Terdapat beberapa teori dalam pertumbuhan indeks pembangunan manusia regional, seperti :

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu perubahan yang berlangsung secara berkelanjutan dalam perekonomian suatu negara menuju kondisi yang lebih baik dalam suatu periode tertentu. Proses ini juga dapat dijelaskan sebagai peningkatan produk nasional bruto atau pendapatan nasional riil. Untuk menilai tingkat pertumbuhan ekonomi, perbandingan pendapatan nasional dari berbagai tahun perlu dilakukan. Dalam konsepnya, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses di mana kapasitas produksi perekonomian meningkat seiring berjalannya waktu, yang bertujuan untuk menghasilkan tingkat pendapatan yang semakin besar (Todaro, 2006). Artinya, pertumbuhan ekonomi adalah perjalanan menuju peningkatan kemampuan produksi suatu perekonomian dengan tujuan mencapai tingkat pendapatan yang lebih tinggi.

2. Teori Pertumbuhan Klasik

Menurut pandangan Adam Smith, aset utama dalam kegiatan produksi masyarakat adalah sumber daya alam. Jumlah sumber daya alam yang tersedia di suatu daerah dianggap sebagai "batas maksimum" bagi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Saat sumber daya alam belum digunakan sepenuhnya, penentu utama dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya tersebut adalah jumlah penduduk dan stok modal di daerah tersebut. Perannya sumber daya manusia dalam proses pertumbuhan output dianggap bersifat pasif. Jika pertumbuhan penduduk tinggi, hal ini dapat mengurangi tingkat aktivitas ekonomi karena

produktivitas tiap individu cenderung menurun. Pada saat kondisi tersebut terjadi, kemakmuran masyarakat akan mengalami penurunan.

2.1.1.5 Manfaat Indeks Pembangunan Manusia

1. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
2. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.
3. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

2.1.2 Kemiskinan

2.1.2.1 Pengertian Kemiskinan

Menurut Soerjono Soekanto dalam (Senewe et al., 2021), kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Menurut Amarta (1987) dalam (Wulandari & Rachmawati, 2021) kemiskinan di kaitkan dengan kemampuan untuk menjalankan suatu fungsi dalam masyarakat. Dengan demikian kemiskinan timbul apabila masyarakat tidak memiliki pendapatan, dan tidak mendapatkan pendidikan yang memadai, serta kondisi kesehatan yang buruk. Kemiskinan di anggap sebagai sebuah fenomena multidimensional.

2.1.2.2 Indikator Kemiskinan

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, BPS (2007:54–55) menggunakan tiga indikator kemiskinan, yaitu:

1. *Head Count Index*, yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
2. *Poverty Gap Index* (Indeks Kedalaman Kemiskinan), yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.
3. *Poverty Severity Index* (Indeks Keparahan Kemiskinan) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Dari ketiga pendekatan tersebut Kuncoro (2006) menyatakan bahwa cara yang paling sederhana untuk mengukur kemiskinan adalah dengan ukuran *Head Count Index*.

2.1.2.3 Jenis-Jenis Kemiskinan

Menurut Todaro (2008) kemiskinan dapat dibedakan menurut menurut sifatnya yang terdiri atas:

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut merupakan kondisi ketidakmampuan finansial untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, dan kebutuhan lain yang esensial untuk menjalani kehidupan. Penilaian kemiskinan ini dilakukan dengan mempertimbangkan

pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi fasilitas umum atau kebutuhan pokok tersebut

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang berkaitan dengan distribusi pendapatan dengan melihat ketidakmerataan dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Atau pendapatan masih rendah di antara lingkungan sekitar.

Di samping itu Nasution (1996) berpendapat bahwa kemiskinan dibagi dalam dua kategori yaitu:

1. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural, dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung karena sistem lembaga yang mencakup tidak hanya organisasi tetapi juga peraturan yang ditetapkan. Kemiskinan struktural menciptakan situasi di mana sebagian anggota masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk menguasai sumber daya ekonomi dan berbagai fasilitas yang tersedia.

2. Kemiskinan Alamiah

kemiskinan alamiah terjadi akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia dan alam, penggunaan teknologi yang kurang maju, dan dampak bencana alam. Dalam kondisi di mana sumber daya manusia dan alam memiliki kualitas yang rendah atau terbatas, peluang produksi menjadi terbatas atau tingkat efisiensi produksi menjadi rendah.

2.1.2.4 Penyebab Kemiskinan

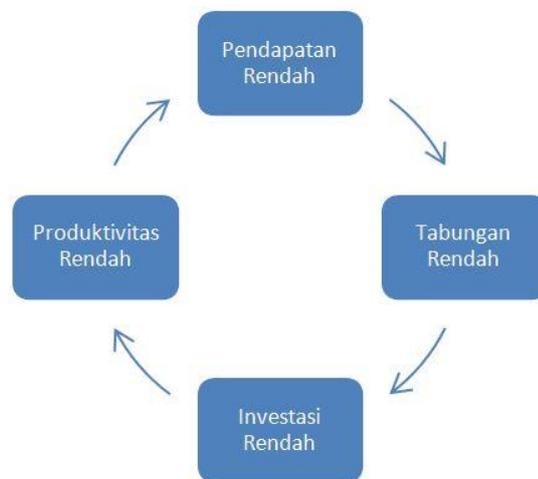
Masalah kemiskinan yang terjadi antar suatu daerah dengan daerah lain pasti berbeda. Faktor–faktor yang menjadi penyebab kemiskinan meliputi faktor ekonomi, faktor sosial, faktor struktural (politik), dan lain-lain. Kemiskinan identik dengan negara yang sedang berkembang, dimana permasalahan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mengakibatkan negara sedang berkembang sulit untuk maju.

Sharp (1996) dalam (Abdul Aziz et al., 2016) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi:

1. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidak samaan pola kepemilikan sumber daya yang menyebabkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berdampak pada produktivitas yang rendah, dan kemudian mengakibatkan upah yang diterima juga rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan.
3. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Teori ini ditemukan oleh Ragnar Nurkse, yang mengatakan: “*a poor country is poor because it is poor*” (negara miskin itu

miskin karena dia miskin). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya.



Gambar 2. 1 Lingkara Setan Kemiskinan Versi Nurkse

2.1.2.5 Teori-Teori Kemiskinan

1. Teori Malthus

Teori ini mengatakan terjadinya kemiskinan kronis merupakan akibat dari pertumbuhan penduduk yang pesat pada suatu negara. Pertumbuhan penduduk akan meningkat dengan pesat dan cepat menurut deret ukur, sementara dengan proses bertambahnya hasil yang berkurang dari jumlah yang tetap pada faktor produksi seperti tanah, maka ketersediaan pangan meningkat menurut deret hitung.

2. Teori Lingkaran Setan Kemiskinan

Teori ini dikemukakan oleh Nurkse, yang menyatakan bahwa kemiskinan terjadi karena kondisi pasar yang jauh dari sempurna, modal terbatas, dan sumber daya manusia yang rendah, sehingga menyebabkan produktivitas rendah.

3. Teori Paradigma Neo-Liberal

Teori ini menyatakan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan individu, bukan kelompok, yang disebabkan oleh kelemahan atau pilihan hidup individu yang bersangkutan. Kemiskinan akan hilang apabila kekuatan pasar diperluas sebesar-besarnya dan pertumbuhan ekonomi ditingkatkan setinggi-tingginya.

4. Teori Paradigma Sosial Demokrat

Teori ini menyatakan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan struktural, bukan individu, yang disebabkan oleh adanya ketidakadilan dan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat akibat dari terbatasnya akses kelompok tertentu terhadap berbagai sumber kemasyarakatan. Kesetaraan merupakan prasyarat penting dalam memperoleh kemandirian dan kebebasan

2.1.3 Pengangguran

2.1.3.1 Pengertian Pengangguran

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak

mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Menurut Sukirno dalam (Pramudjasi et al., 2019) pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Seseorang yang tidak bekerja namun tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai pengangguran. Fator utama yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah kurangnya pengeluaran agregat. Pengusaha memproduksi barang dan jasa dengan maksud memperoleh keuntungan, akan tetapi keuntungan tersebut akan diperoleh apabila pengusaha tersebut dapat menjual barang dan jasa yang mereka produksi. Semakin besar permintaan, semakin besar pula barang dan jasa yang mereka wujudkan. Kenaikan produksi yang dilakukan akan menambah penggunaan tenaga kerja.

Untuk mengukur tingkat pengangguran suatu wilayah bisa diperoleh melalui dua pendekatan :

1. Pendekatan Angkatan Kerja (*Labour force approach*)

Besar kecilnya tingkat pengangguran dapat dihitung berdasarkan presentase dan perbandingan jumlah antara orang yang menganggur dan jumlah angkatan kerja.

$$\text{Pengangguran} = \frac{\text{Jumlah yang menganggur}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$$

2. Pendekatan pemanfaatan tenaga kerja (*Labour utilization approach*)

- a. Bekerja penuh (*employed*) adalah orang-orang yang bekerja penuh atau jam kerjanya mencapai 35 jam per minggu.

- b. Setengah menganggur (*underemployed*) adalah mereka yang bekerja namun belum dimanfaatkan penuh atau jam kerjanya dalam seminggu kurang dari 35 jam.

2.1.3.2 Jenis-jenis Pengangguran

1. Pengangguran Berdasarkan Penyebabnya

Menurut Sukirno (1994) berdasarkan penyebabnya, pengangguran dibagi menjadi empat kelompok:

a. Pengangguran Normal atau Friksional

Jika dalam konteks ekonomi tertentu terdapat tingkat pengangguran sekitar dua atau tiga persen dari total angkatan kerja, hal ini dianggap sebagai pencapaian kesempatan kerja penuh. Tingkat pengangguran sebesar dua atau tiga persen tersebut dikenal sebagai pengangguran normal atau friksional. Kelompok penganggur ini tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, melainkan sedang aktif mencari peluang kerja yang lebih baik.

b. Pengangguran Siklikal

Pengangguran siklikal adalah fluktuasi pengangguran yang disebabkan oleh siklus bisnis. Dengan menurunnya produksi pada masa resesi, banyak perusahaan mengurangi permintaan input, termasuk tenaga kerja. Pengangguran siklikal meningkat selama masa resesi dan menurun pada masa ekspansi.

c. Pengangguran Struktural

Adanya lowongan dan pengangguran pada saat yang sama adalah bahwa penganggur tidak mempunyai keterampilan yang diminta pemberi kerja, atau tidak tinggal di daerah yang keterampilannya dibutuhkan. Pengangguran yang muncul karena ketidaksesuaian keterampilan atau lokasi geografis disebut pengangguran struktural.

d. Pengangguran Teknologi

Pengangguran teknologi merujuk pada kondisi di mana pekerjaan manusia digantikan atau otomatisasi oleh teknologi, seperti mesin atau perangkat lunak. Fenomena ini terjadi ketika teknologi baru mengubah cara pekerjaan dilakukan, mengakibatkan perubahan struktural dalam pasar tenaga kerja. Pengangguran teknologi bisa terjadi ketika pekerjaan rutin atau repetitif dapat dilakukan lebih efisien oleh teknologi, mengakibatkan sebagian pekerja kehilangan pekerjaan mereka.

2. Pengangguran Berdasarkan Cirinya

Berdasarkan cirinya, Pengangguran dibagi menjadi empat kelompok (Sukirno, 1994):

a. Pengangguran Terbuka

Pengangguran ini adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal dan sebagai akibat penambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah daripada penambahan tenaga kerja. Pengangguran terbuka

dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan suatu industri.

b. Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran ini adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Salah satunya adalah karena kecilnya perusahaan dengan tenaga kerja yang terlalu banyak sehingga untuk menjalankan kegiatannya tidak efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi.

c. Setengah Menganggur

Pengangguran ini adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari dalam seminggu, atau satu hingga empat jam sehari. Pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja seperti ini digolongkan sebagai setengah menganggur.

d. Pengangguran Musiman

Pengangguran ini adalah tenaga kerja yang tidak bekerja karena terikat pada musim tertentu. Pengangguran seperti ini terutama di sektor pertanian dan perikanan. Pada umumnya petani tidak begitu aktif di antara waktu sesudah menanam dan panen. Apabial dalam masa tersebut

mereka tidak melakukan pekerjaan lain maka mereka terpaksa menganggur.

2.1.3.3 Teori-teori Pengangguran

1. Teori Klasik

Teori klasik menjelaskan bahwa pengangguran dapat dicegah melalui sisi penawaran dan mekanisme harga di pasar bebas agar dapat menjamin adanya permintaan yang akan menyerap semua penawaran. Menurut pandangan klasik, pengangguran terjadi karena mis-alokasi sumber daya yang bersifat sementara karena dapat diatasi dengan mekanisme harga menurut Gilarso dalam (Junaidi, 2023)

2. Teori Keynes

Menurut Keynes dalam (Vidiasari, 2016) pengangguran merupakan akibat dari kurangnya permintaan efektif, dan untuk mengatasinya Keynes menyarankan agar memperbesar pengeluaran konsumsi. Dalam hal ini maka Keynes menganjurkan adanya campur tangan pemerintah melalui kebijakan fiskal dan kebijakn moneter yang dapat mempengaruhi permintaan, dalam teorinya, Keynes menganggap tabungan sebagai sifat sosial yang buruk karena kelebihan tabungan menyebabkan terjadinya kelebihan supply sehingga produsen dapat merugi yang akhirnya dapat menyebabkan terjadinya pemutusan kerja yang besar-besaran dan menciptakan suatu kondisi ekonomi yang buruk.

3. Teori Kependudukan dari Malthus

Teori Malthus menjelaskan bahwa semakin pesatnya jumlah penduduk akan menghasilkan tenaga kerja yang semakin banyak pula, namun hal ini tidak diimbangi dengan kesempatan kerja yang ada. Karena jumlah kesempatan yang sedikit itulah maka manusia saling bersaing dalam memperoleh pekerjaan dan yang tersisih dalam persaingan tersebut menjadi golongan penganggur.

2.1.3.4 Penyebab Terjadinya Pengangguran

Pengangguran adalah suatu hal yang tidak diinginkan, namun menjadi suatu penyakit yang terus menjalar di beberapa Negara, dikarenakan banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk mengurangi jumlah angka pengangguran perlu adanya kerjasama antara lembaga pendidikan, masyarakat, dan lain-lain. Berikut adalah beberapa faktor penyebab pengangguran:

1. Sedikitnya lapangan pekerjaan yang menampung para pencari kerja. Banyaknya para pencari kerja tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang dimiliki oleh Negara Indonesia.
2. Kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pencari kerja. Banyak jumlah sumber daya manusia yang tidak memiliki keterampilan menjadi salah satu penyebab makin bertambahnya angka pengangguran di Indonesia.
3. Kurangnya informasi, dimana pencari kerja tidak memiliki akses untuk mencari tau informasi tentang perusahaan yang memiliki kekurangan tenaga pekerja.

4. Kurang meratanya lapangan pekerjaan, banyaknya lapangan pekerjaan di kota, dan sedikitnya pemerataan lapangan pekerjaan.
5. Masih belum maksimalnya upaya pemerintah dalam memberikan pelatihan untuk meningkatkan softskill budaya malas yang masih menjangkit para pencari kerja yang membuat para pencari kerja mudah menyerah dalam mencari peluang kerja.

2.1.3.5 Dampak Pengangguran

Menurut Samuelson dalam (Nova Rianda et al., 2020) menyebutkan adanya dampak dari pengangguran, diantaranya:

1. Dampak pengangguran terhadap suatu perekonomian

Tingkat pengangguran yang relatif tinggi menyebabkan sulitnya masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut, dimana dapat dilihat dengan jelas akibat buruk dari masalah pengangguran yang timbul karena ekonomi, yaitu :

- a. pengangguran menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan kesejahteraan. Hal itu terjadi karena pendapatan nasional yang sebenarnya (actual output) yang dicapai lebih rendah dari pendapatan nasional potensial (potencial output), yang menyebabkan tingkat kemakmuran masyarakat yang dicapai lebih rendah dari tingkat yang dicapainya.
- b. Pengangguran mengakibatkan pendapatan pemerintah (*tax revenue*) menjadi berkurang. Hal tersebut terjadi karena tingkat ekonomi yang

rendah, sehingga menyebabkan pendapatan yang diperoleh pemerintah menjadi sedikit.

- c. Pengangguran dapat menimbulkan dua akibat buruk pada sektor swasta. Pertama, dimana pengangguran dari tenaga kerja diakibatkan oleh adanya lebihnya kapasitas mesin-mesin yang disediakan disuatu perusahaan. Kedua, pengangguran yang diakibatkan karena lesunya kegiatan yang dialami oleh suatu perusahaan sehingga menyebabkan keuntungan perusahaan menjadi berkurang. Karena, jika keuntungan suatu perusahaan rendah menyebabkan menjadi berkurangnya perusahaan lain untuk melakukan investasi.

2. Dampak Pengangguran terhadap individu dan masyarakat

Selain membawa akibat buruk terhadap perekonomian, pengangguran juga membawa dampak buruk terhadap individu dan masyarakat, antara lain:

- a. Pengangguran menyebabkan seseorang menjadi kehilangan mata pencaharian dan juga pendapatannya. Dapat kita ketahui bahwa di negara-negara yang sudah maju pengangguran disana mendapatkan atau memperoleh bantuan keuangan dari pemerintah berupa asuransi pengangguran, karena itulah para pengangguran dinegara yang sudah maju masih dapat membiayai kehidupannya dan juga keluarganya dan dengan begitu mereka tidak harus bergantung kepada orang lain.
- b. Pengangguran dapat mengakibatkan seseorang kehilangan keterampilannya. Dimana keterampilan seseorang dapat bertahan jika

seseorang tersebut biasa mempraktekkan keterampilannya. Hal itulah yang menyebabkan pengangguran dalam kurun waktu yang lama dapat menyebabkan tingkat keterampilan menjadi turun sehingga tidak lagi bisa melakukan keterampilan yang sebelumnya telah sering dipraktekkan.

- c. Pengangguran dapat mengakibatkan ketidakstabilan sosial dan politik. Jika kegiatan ekonomi suatu perusahaan sedang lesu dan pengangguran tinggi maka hal itu dapat menimbulkan rasa tidak puas masyarakat kepada pemerintah yang berkuasa. Hal tersebut mengakibatkan golongan yang berkuasa dipandang jelek oleh masyarakat, dengan melontarkan kritikan dan juga tuntutan kepada pemerintah dan disertai dengan demonstrasi atau unjuk rasa.

2.1.4 Ketimpangan Pendapatan

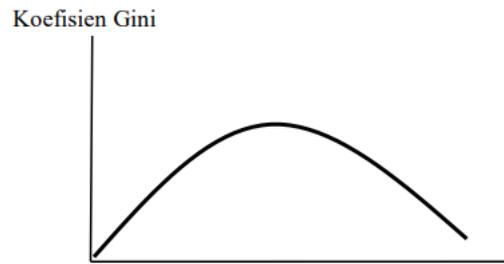
2.1.4.1 Pengertian Ketimpangan Pendapatan

Kesenjangan atau ketimpangan distribusi pendapatan dapat diartikan sebagai perbedaan kemakmuran ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin, hal ini tercermin dari adanya perbedaan pendapatan menurut Baldwin dalam (Sugiasuti & Pratama, 2018) Ketimpangan distribusi pendapatan terjadi karena kuatnya dampak balik dan lemahnya dampak sebar di negara-negara berkembang (Jhingan, 1999). Ketimpangan atau disparitas antar daerah merupakan hal yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Perbedaan ini membuat kemampuan suatu

daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu di setiap daerah biasanya terdapat istilah daerah maju dan daerah terbelakang.

Menurut Sukirno (2006), pada dasarnya distribusi pendapatan merupakan suatu konsep yang membahas tentang penyebaran pendapatan setiap orang atau rumah tangga dalam masyarakat. Terdapat dua konsep pokok mengenai pengukuran distribusi pendapatan, yaitu konsep ketimpangan absolut dan konsep ketimpangan relatif. Konsep ketimpangan absolut merupakan konsep pengukuran ketimpangan yang menggunakan parameter dengan suatu nilai mutlak (Sukirno, 2006). Sedangkan konsep ketimpangan relatif merupakan konsep pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan yang membandingkan besarnya pendapatan yang diterima oleh seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dengan besarnya total pendapatan yang diterima oleh masyarakat secara keseluruhan (Sukirno, 2006).

Teori ketimpangan distribusi pendapatan dapat dikatakan dimulai dari munculnya suatu hipotesis yaitu hipotesis “U-terbalik” yang dikemukakan oleh Simon Kuznet tahun 1955. Kuznet (1955) menyatakan bahwa mula-mula ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan akan makin merata.



Gambar 2. 2 Kurva Kuznet

Pada gambar 2.2 dapat diketahui bahwa pendapatan akan semakin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi makin merata. Beberapa tahapan peningkatan dan kemudian penurunan ketimpangan pendapatan yang dikemukakan oleh Kuznet tidak dapat dihindari, namun semua tergantung pada proses pembangunan yang dijalankan oleh masing-masing negara menurut Todaro dalam (Mugabe et al., 2018)

Terdapat dua model ketimpangan yaitu teori menurut Harrod Domar dan teori menurut Neo-klasik. Kedua teori tersebut memberikan peranan khusus pada peranan modal yang dapat direpresentasikan dengan kegiatan investasi yang ditanamkan pada suatu daerah untuk menarik modal kedalam daerahnya. Hal tersebut jelas akan mempengaruhi kemampuan setiap daerah untuk tumbuh sekaligus akan menciptakan perbedaan dalam kemampuan menghasilkan pendapatan. Investasi dianggap lebih menguntungkan jika dialokasikan pada daerah yang mampu menghasilkan pengembalian (*return*) yang besar dalam jangka waktu yang relatif cepat. Mekanisme pasar justru akan menyebabkan ketidakmerataan, dimana daerah-daerah yang relatif maju akan bertumbuh semakin cepat sementara daerah yang kurang maju tingkat pertumbuhannya justru relatif

lambat. Hal ini yang menyebabkan timbulnya ketimpangan pendapatan antar daerah, sehingga diperlukan suatu perencanaan dan kebijakan dalam mengarahkan alokasi investasi menuju suatu kemajuan ekonomi yang lebih berimbang di seluruh wilayah dalam negara.

2.1.4.2 Pengukuran Ketimpangan Pendapatan

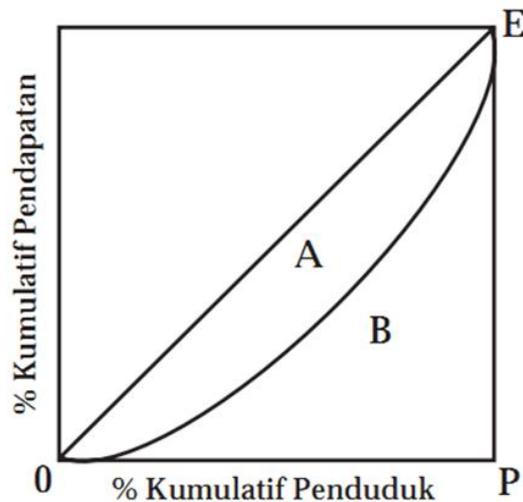
1. Size Distribution

Secara umum ketimpangan yang pertama ini dihitung dengan menghitung berapa persen pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk yang paling miskin. Selanjutnya ukuran ketimpangan bisa pula dilakukan dengan membandingkan persentase pendapatan yang diterima oleh 40 persen orang paling miskin dengan persentase yang diterima oleh 20 persen orang paling kaya.

- a. Tingkat ketimpangan berat apabila 40 persen penduduk paling miskin menerima kurang dari 12 persen pendapatan nasional.
- b. Tingkat ketimpangan sedang apabila 40 persen penduduk paling miskin menerima antara 12-17 persen dari pendapatan nasional.
- c. Tingkat ketimpangan ringan apabila 40 persen penduduk paling miskin menerima diatas 17 persen dari pendapatan nasional.

2. Kurva Lorenz

Kurva Lorenz adalah kurva yang menggambarkan fungsi distribusi pendapatan kumulatif. Kurva ini terletak disebuah bujur sangkar yang disisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi dasarnya mewakili persentase kumulatif penduduk.



Gambar 2. 3 Kurva Lorenz

Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), maka ia mencerminkan keadaan yang semakin buruk, distribusi pendapatan nasional semakin timpang atau tidak merata (Al & Subrata, 2018)

3. Gini Rasio

Indeks Gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang dihitung dengan membandingkan luas antar diagonal, kurva lorenz dibagi dengan luas segitiga di bawah diagonal. Indeks Gini bernilai antara nol hingga satu. Jika nilai indeks gini mendekati nol maka menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah sedangkan jika nilai indeks gini mendekati satu maka menunjukkan adanya ketimpangan yang tinggi (Todaro, 2006). Indeks gini digunakan untuk melihat adanya hubungan antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu dengan total pendapatan.

Ukuran data yang diperlukan dalam penghitungan indeks gini meliputi:

- a. jumlah rumah tangga atau penduduk
- b. rata-rata pendapatan atau pengeluaran rumah tangga yang sudah dikelompokkan menurut kelasnya.

Rumus yang digunakan untuk menghitung indeks gini adalah:

$$G = \sum_{i=1}^k \frac{P_i(Q_i + Q_{i-1})}{1000}$$

Keterangan:

G = Indeks Gini

P_i = Persentase rumah tangga pada kelas pendapatan ke- i

Q_i = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas - i

Q_{i-1} = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas ke - i

k = Banyaknya kelas pendapatan

nilai indeks gini berkisar antara 0 dan 1, jika:

$G < 0,3$ = ketimpangan rendah

$0,3 \leq G \leq 0,5$ = ketimpangan sedang

$G > 0,5$ = ketimpangan tinggi

4. Menurut Bank Dunia

Bank Dunia mengukur ketimpangan distribusi pendapatan suatu negara dengan melihat besarnya kontribusi 40% penduduk termiskin. Kriterianya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Indikator Ketimpangan Menurut Bank Dunia

(Word Bank)

Klarifikasi Ketimpangan	Ketimpangan Distribusi Pendapatan
Ketimpangan Tinggi	40% penduduk berpendapatan rendah dan menerima < 12% dari total pendapatan
Ketimpangan Sedang	40% penduduk berpendapatan rendah dan menerima 12%-17% dari total pendapatan
Ketimpangan Rendah	40% penduduk berpendapatan rendah dan menerima > 17% dari total pendapatan

Sumber: *Word Bank*

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Oleh karena data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan selama ini didekati dengan menggunakan data pengeluaran. Dalam hal ini, analisis distribusi pendapatan dilakukan dengan menggunakan data total pengeluaran rumah tangga sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Susenas. Dalam analisis, dapat menggunakan dua ukuran untuk merefleksikan ketimpangan pendapatan yaitu Koefisien Gini (Gini Ratio) dan Ukuran Bank Dunia.

2.1.4.3 Penyebab Ketimpangan Pendapatan

Adelman dan Morris dalam mengemukakan delapan faktor yang menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan di negara-negara sedang berkembang, yakni:

1. Tingginya pertambahan penduduk yang akan berdampak pada penurunan pendapatan per kapita
2. Inflasi yaitu pertambahan pendapatan uang tetapi tidak dengan pertambahan produksi barang-barang
3. Ketimpangan pembangunan antar daerah
4. Banyaknya investasi dalam proyek padat modal (*capital intensive*).
Sehingga persentase pendapatan modal dari tambahan harta lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, maka pengangguran bertambah.
5. Mobilitas sosial masyarakat yang rendah
6. Pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang mengakibatkan harga-harga barang hasil industri mengalami kenaikan untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis
7. Ketidakelastisan permintaan negara-negara terhadap barang ekspor negaranegara sedang berkembang yang menyebabkan memburuknya nilai tukar (*term of trade*) bagi negara yang sedang berembang dalam perdagangan dengan negara maju
8. Industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain akan hancur.

2.1.5 Kriminalitas

2.1.5.1 Pengertian Kriminalitas

Kriminalitas atau kejahatan merupakan permasalahan umum yang sering terjadi dalam Masyarakat di berbagai tempat, baik secara bersamaan maupun dalam rentang waktu yang berbeda. Menurut Abdulsyani (1987) Kriminalitas adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan masalah-masalah dan keresahaan bagi kehidupan didalam masyarakat, Soesilo (1988) menyatakan bahwa kejahatan adalah yang memiliki dua macam pengertiannya yaitu secara yuridis dan secara sosiologi. Secara yuridis formal, kejahatan adalah tingkah laku kejahatan yang melanggar hukum pidana yang ada. Pengertian secara sosiologi adalah meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dengan undang-undang.

Kejahatan merupakan elemen integral dalam kehidupan masyarakat. Terjadinya kejahatan dikarenakan adanya ketidakseimbangan perilaku di dalam masyarakat, yang dipengaruhi oleh berbagai budaya dari luar. Hal ini menyebabkan anggota masyarakat cenderung menunjukkan perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku, terutama di lingkungan sosial yang memiliki peran signifikan dalam membentuk perilaku kejahatan. Seorang Filsuf bernama Cicero mengatakan *Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime* yang artinya ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan. Masyarakat saling menilai, berkomunikasi dan menjalin interaksi, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik atau perikatan. Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku yang

menyimpang apabila perilaku kelompok lain tersebut tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya.

2.1.5.2 Teori-teori Kriminalitas

Karl Max berpendapat bahwa kriminalitas muncul merupakan salah satu produk dan sistem ekonomi kapitalis. Mary dalam (Mardhatillah et al., 2023) meneliti penelitian selama dengan menggunakan data statistika pada tahun 1836-1861, yang menyimpulkan bahwa adanya pengaruh antara kenaikan harga gandum dengan peningkatan Kriminalitas (Boeger, 1970). Backer (1968) merupakan salah satu pelopor yang melakukan kajian tentang kriminalitas dari pendekatan Ilmu Ekonomi. Dalam melakukan analisis, Becker melakukan pendekatan ekonomi seperti yang dilakukan oleh para ekonomi terdahulu terhadap setiap permasalahan sosial yang ada. Dapat diasumsikan bahwa seseorang dapat melakukan kejahatan, jika apabila ekspektasi utilitas (*expacted utility*) melebihi utilitas (*utility*) yang diperoleh dan jika seseorang menggunakan waktu dan sumber data yang ada untuk melakukan kegiatan yang lainnya. Beberapa orang akan menjadi Kriminal, bukan karena Motivasi dasar, tetapi karena perhitungan dan manfaat biaya yang akan di keluarkan (*benefit and cost*) (Backer, 1968)

Backer (1968) mengembangkan model fungsi untuk menggambarkan persamaan ekspektasi dari tindakan kriminalitas yang ada, ada pun sebagai berikut:

$$EU_j = p_j U_j(Y_j - f_j) + (1-p_j) U_j(Y_j)$$

Penjelasanya dimana:

$EU_j =$ *Expected Utility* tindakan kriminalitas;

$p_j =$ Probabilitas tindakan kriminalitas ditangkap;

$U_j =$ Fungsi utilitas

$Y_j =$ Pendapatan yang diperoleh dari tindakan kriminalitas;

$F_j =$ Interpretasi sejumlah uang yang setara dengan hukuman.

Persamaan diatas menggambarkan bahwa seseorang dapat melakukan tindakan kriminalitas yang ada mempunyai dua probabilitas yaitu probabilitas tindakan kriminalitas tertangkap (p_j) dan probabilitas tindakan kriminalitas yang tidak tertangkap ($1-p_j$). Jika tindakan yang tertangkap, maka utilitas yang akan diperoleh dari tindakan kriminalitas yaitu merupakan fungsi dari pendapatan yang akan diperoleh dari tindakan kriminalitas (Y_j). Jika tertangkap, maka utilitas yang akan didapatkan dari tindakan kriminalitas dikurangi dengan sejumlah interpretasi sejumlah uang yang setara dengan jumlah hukuman (Y_j-f_j). Oleh karena itu, *expected utility* dari tindakan kriminalitas merupakan penjumlahan dari probabilitas tindakan kriminalitas yang ada, yaitu merupakan tindakan kriminalitas yang tertangkap dengan probabilitas tindakan kriminalitas jika tidak tertangkap, sebagai persamaannya.

2.1.5.3 Faktor Penyebab Kriminalitas

Menurut Kansil (1994), Pada dasarnya setiap individu akan dipengaruhi oleh beberapa faktor baik intern maupun ekstern yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan kriminal. Beberapa faktor tersebut adalah sebagai berikut:

motivasi intrinsik (faktor intern), meliputi faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak, faktor ketenagakerjaan (pengangguran atau memiliki pekerjaan), dan faktor taraf kesejahteraan. Motivasi ekstrinsik (faktor ekstern), meliputi faktor pendidikan, dan faktor pergaulan atau pengaruh lingkungan.

1. Kemiskinan, kemiskinan kronis tanpa jalan keluar mengakibatkan banyak orang berputus asa, sehingga kejahatan atau kriminalitas merupakan satu-satunya jalan untuk menolong kehidupan.
2. Pengangguran, besarnya jumlah angka pengangguran mempunyai pengaruh sosial yang luas karena mereka tidak memiliki pekerjaan sekaligus tidak memiliki pendapatan. Maka semakin tinggi jumlah angka pengangguran semakin tinggi pula tingkat kerawanan sosial yang ditimbulkan, contohnya kriminalitas.
3. Jumlah Penduduk, salah satu penyebab kejahatan antara lain dipengaruhi oleh faktor sosial yaitu kepadatan penduduk.
4. Pendidikan, bahwa tindakan kriminal salah satunya dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Karena pendidikan merupakan faktor penting penentu tinggi rendahnya sumber daya manusia.
5. Moral, tingkah laku manusia yang jahat, immoral dan antisosial itu banyak menimbulkan reaksi kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas sangat merugikan umum.

2.1.5.4 Indikator Kriminalitas

Menurut Badan Pusat Statistik indikator yang digunakan untuk mengukur angka kejahatan adalah sebagai berikut :

1. Angka Jumlah Kejahatan (*Crime Total*)

Pengukuran Indeks Kejahatan (It) Indeks kejahatan yaitu persentase kenaikan atau penurunan kejadian kejahatan selama setahun dibandingkan terhadap satu tahun tertentu (yang dijadikan tahun dasar).

2. Selang Waktu Terjadinya Suatu Tindak Kejahatan (*Crime Clock*)

Selang Waktu Kejahatan adalah selang waktu atau interval waktu terjadinya satu tindak kejahatan dengan kejahatan yang lain. Selang waktu kejadian kriminal dinyatakan dalam satuan waktu detik.

3. Jumlah Orang Yang Berisiko Terkena Tindak Kejahatan (*Crime Rate*)

Angka kejahatan (umumnya per 100.000 orang penduduk) dengan cara perhitungan jumlah peristiwa kejahatan yang dilaporkan selama setahun dibagi jumlah penduduk pada tahun tersebut dikalikan 100.000.

Pengukuran Indeks Kejahatan (It) yaitu jumlah kenaikan atau penurunan kejadian kejahatan selama setahun dibandingkan terhadap satu tahun tertentu (yang dijadikan tahun dasar). Adapun rumus menentukan indeks kejahatan adalah sebagai berikut :

$$it = \frac{\text{jumlah kejahatan pada tahun } t}{\text{jumlah kejahatan pada tahun } t_0} \times 100$$

Keterangan:

t_0 = Tahun Dasar

t = Tahun t

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk peneltiain selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagaian ini peneliti mencamtumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Ari Kristin Prasetyoningrum & U. Sulia Sukmawati (2018) "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia"	Variabel Independen: IPM Variabel Dependen: Kemiskinan	Variabel Independen: Pertumbuhan Ekonomi & Pengangguran	IPM berpengaruh secara langsung dan negatif terhadap tingkat kemiskinan	Jurnal Ekonomi Syariah Vol 6, No 2 (2018) p-ISSN 2355-0228 e-ISSN 2502-240
2	Sayifullah & Tia Ratu Gandasari (2016)	Variabel Independen: IPM	Variabel Independen: Pengangguran	Secara simultan ada pengaruh IPM terhadap kemiskinan. Secara	Jurnal Ekonomi-Qu Vol 6,

	“Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten”	Variabel Dependen: Kemiskinan		parsial, IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan.	No 2 (2016) ISSN 2089- 4473 e-ISSN 2541- 1314
3	Ikhsanudin Sukron & Ach Yasin (2021) “Pengaruh IPM, Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah”	Variabel Independen: IPM	Variabel Independen: Pertumbuhan Ekonomi & Pengeluaran Pemerintah	IPM secara parsial berpengaruh negative terhadap kemiskinan. Secara simultan, IPM berpengaruh terhadap kemiskinan	<i>Journal of Economic s</i> , Vol 1, No 3 (2021) E-ISSN 2798- 5008
4	Dwi Mahroji & Iin Nurkhasanah (2019) “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Banten”	Variabel Independen: IPM	Variabel Dependen: Pengangguran	IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran	Jurnal Ekonomi- Qu, Vol 9, No 1 April 2019 P-ISSN 2089- 4473 E-ISSN 2541- 1314
5	Cony Ayu Nurlita, Adnan Haris Musa, dan Rahcmad Budi Suharto (2017) “Pengaruh Indeks	Variabel Independen: IPM	Variabel Independen: Jumlah Penduduk Miskin	IPM tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran	JIEM, Vol 2, No 1 (2017) ISSN 2715- 3797

	Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran dan Jumlah Penduduk Miskin di Samarinda”				
6	Charles G. Polii, Amran T. Naukoko, dan Hanly F. Dj. Siwu (2023) “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran di Kota Tomohon”	Variabel Independen: IPM Variabel Dependen: Pengangguran	Variabel Independen: Pertumbuhan Ekonomi	Secara Simultan IPM tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. IPM berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol. 23 No. 5 Mei 2023 e-ISSN 0853-6708
7	Lina Marlina (2022) “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia”	Variabel Independen: IPM Variabel Dependen: Pengangguran	Variabel Independen: Pertumbuhan Ekonomi & Upah Minimum	Secara simultan, IPM IPM berpengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat penganggura. Secara parsial, IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat pengangguran terbuka	Journal of Economic s and Business Vol 6 Nomor 1, 2022 ISSN. 2597-8829
8	Dewi Septiani, Dra. Sudati, dan	Variabel Independen: IPM	Variabel independen:	Baik secara parsial maupun simultan, IPM memiliki	Directory Journal of Economic

	Yustirania (2019)	Variabel Dependen: Ketimpangan Pendapatan	PDRB & Inflasi	pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di D.I	s Vol 1, No 3, 2019
	“Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2017”				
9	Nita Tri Hartini (2017)	Variabel Independen: IPM	Variabel Independen: PDRB per Kapita & Investasi	Seacara simultan IPM berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan Seacara parsial IPM berpengaruh negative dan signifikan	Jurnal Pendidikan dan Ekonomi Vol 6, No 6, 2017 ISSN 2549-5771
	“Pengaruh PDRB per Kapita, Investasi, dan IPM terhadap Ketimpangan Pendapatan Antara Daerah di Provinsi DIY tahun 2011-2015”	Variabel Dependen: Ketimpangan Pendapatan			
10	Annisa Febriyani & Ali Anis (2021)	Variabel Independen: IPM	Variabel Independen: Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi	IPM berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.	Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan Vol 3, No 4, 2021 e-ISSN 26556-0356
	“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan	Variabel dependen: Ketimpangan Pendapatan			

Distribusi Pendapatan di Indonesia”					
11	Muhammad Ersad, Amri Amir, dan Zulgani (2022) “Dampak IPM, Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Bagian Selatan”	Variabel Independen: IPM Variabel Dependen: Ketimpangan	Variabel Independen: Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan	Secara parsial IPM tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan Secara simultan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan	Jurnal Paradigma Ekonometrika Vol 17, No 2, 2022 ISSN 2085-1960
12	Aya Sofia Ardelia (2023) “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kriminalitas di Kalimantan Barat dalam Kerangka Ekonomi Islam”	Variabel Independen: IPM Variabel Dependen: Kriminalitas		IPM berpengaruh negative signifikan terhadap kriminalitas	Jurnal Muamalat Indonesia Vol 3, No 1, 2023 E-ISSN 2777-0435
13	Marko Ilpiyanto & Deki Fujiansyah (2023) “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Ketimpangan Pendapatan terhadap Tingkat	Variabel Independen: IPM Variabel Dependen: Kriminalitas	Variabel Independen: Ketimpangan Pendapatan	Secara parsial IPM berpengaruh positif signifikan terhadap kriminalitas Secara simultan IPM berpengaruh signifikan terhadap kriminalitas	Journal of Economics and Development Planning Vol 3, No 2, 2023 p-ISSN 2776-4311 e-ISSN 2775-7722

	Kriminalitas di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2022”			
14	Yunita Febriani (2021)	Variabel Independen: IPM	IPM berpengaruh negative terhadap kriminalitas	Jurnal Media Wahana Ekonomika Vol 18, No 1 (2021) p-ISSN 1693-4091 e-ISSN 2622-1845
	“Pengaruh Aspek Sumber Daya Manusia terhadap Jumlah Kriminalitas di Sumatera Selatan Tahun 2019”	Variabel Dependen: Kriminalitas		
15	M. Ilham G Mubarak & Tete Saepudin (2023)	Variabel Independen: IPM	Secara simultan IPM berpengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat kriminalitas	Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Vol 3, No 2, 2023 ISSN 2776-4567
	“Analisis Pengaruh Indikator Sosial Ekonomi Terhadap Tingkat Kriminalitas”	Variabel Dependen: Kriminalitas		

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam melaksanakan penelitian disajikan kerangka berpikir untuk mempermudah menjelaskan hubungan beberapa variabel diantaranya:

1. Hubungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan kemiskinan
2. Hubungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pengangguran

3. Hubungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan ketimpangan pendapatan,
4. Hubungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan kriminalitas

2.2.1 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan

Manusia merupakan kekayaan suatu negara. Menurut Kuncoro dalam (Kristin dkk., 2018) yang menjadi fokus utama dalam pembangunan adalah peningkatan kualitas manusia. Komposisi IPM berdasarkan tiga indikator yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup (daya beli) atau pendapatan. Peningkatan pendidikan seseorang sering dikaitkan dengan peningkatan pendapatan atau upah yang diperoleh. Apabila upah mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak orang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi maupun pengalaman pelatihan, semakin tinggi produktivitasnya dan hasilnya ekonomi nasional akan tumbuh lebih tinggi. Disamping pendidikan, kesehatan juga memiliki peranan terhadap pertambahan pendapatan. Pengaruh kesehatan terhadap pendapatan diantaranya dengan perbaikan kesehatan penduduk akan meningkatkan partisipasi angkatan kerja. Perbaikan kesehatan dapat pula membawa perbaikan dalam tingkat pendidikan dan pengembangan potensi diri yang kemudian menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dengan meningkatnya pendapatan Lumbantoruan dan Hidayat (2014)

Beberapa riset telah banyak membuktikan bahwa IPM memengaruhi tingkat kemiskinan diantaranya: penelitian Sofilda dkk (2013) menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/kota Provinsi Papua Sofilda (2016). Begitu juga dengan penelitian Silswanto (2015)

bahwa IPM sangat berperan dalam menanggulangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Walaupun ada beberapa riset yang menyatakan bahwa IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dan dinyatakan bahwa tidak ada hubungan kausalitas antara IPM dan kemiskinan di Indonesia pada periode tahun 1990-2013 (Susilowati dan Wahyudi, 2015)

2.2.2 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran

Teori pertumbuhan baru menjelaskan bahwa peningkatan pembangunan manusia melalui pembangunan modal manusia (*human capital*) yang tercermin dalam tingkat pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan produktivitas manusia sehingga akan meningkatkan permintaan tenaga kerja dan penurunan pada tingkat pengangguran. Menurut Teori Keynes bahwa melalui peningkatan daya beli masyarakat yang menunjukkan peningkatan dalam permintaan agregat dapat mempengaruhi kesempatan kerja. Apabila permintaan agregat rendah maka perusahaan akan menurunkan jumlah produksinya dan tidak dapat menyerap kelebihan tenaga kerja sehingga permintaan dan penawaran tenaga kerja hampir tidak pernah seimbang dan pengangguran sering terjadi. Menurut Hukum Okun (Okun's Law) bahwa melalui peningkatan produktivitas yang disebabkan oleh meningkatnya indeks pembangunan manusia akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja dan peningkatan permintaan tenaga kerja sehingga banyak masyarakat yang dapat terserap di pasar tenaga kerja yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Penelitian yang dilakukan oleh Mahroji dkk., (2019) mengemukakan bahwa IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran. Selain itu, Astrid & Soekapdjo (2020) juga menyatakan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat pengangguran. Tidak hanya itu, Polii dkk., (2023) mengemukakan hasil penelitiannya bahwa IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran. Hal ini sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Todaro (2000) bahwa melalui meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*) dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia.

2.2.3 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia dan Ketimpangan

Pendapatan

Ketimpangan yang terjadi pada suatu wilayah akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Indeks Pembangunan Manusia dan ketimpangan pendapatan memiliki hubungan yang saling berkaitan yang menunjukkan hubungan antara ketimpangan pendapatan yang diukur dengan Indeks Williamson dengan kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari nilai IPM.

Penelitian yang dilakukan oleh Septiani dkk., (2019) menemukan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Peningkatan IPM berarti peningkatan terhadap pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat itu sendiri. Sehingga peningkatan IPM akan menurunkan ketimpangan pendapatan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Becker dalam Agus Iman Solihin (1995) yang menerangkan bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap

ketimpangan pendapatan dan semakin tinggi pendidikan formal yang diperoleh, maka produktivitas tenaga kerja akan semakin tinggi pula. Hal tersebut sesuai dengan Teori *Human Capital* yaitu bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan akan mengurangi disparitas pendapatan. Hasil ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yosi, dkk (2013) bahwa IPM berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

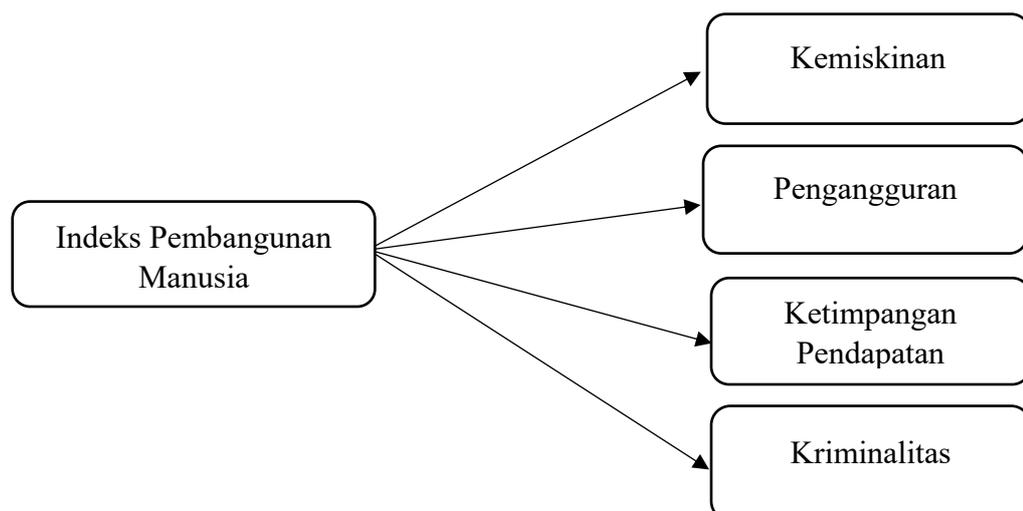
2.2.4 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia dan Kriminalitas

Dalam penelitian terdahulu, IPM merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan dalam menurunkan tingkat kejahatan. Peningkatan IPM menjadi penanda bahwa telah terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat membantu seseorang dalam memperoleh pekerjaan yang layak serta pendapatan yang tinggi. Ketika terjadi peningkatan pendapatan, maka kesejahteraan seseorang juga akan meningkat dikarenakan semua kebutuhannya telah terpenuhi sehingga berdampak pada penurunan tindakan kriminalitas sebab tuntutan hidup seseorang menjadi berkurang.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ardelia (2023) menyatakan bahwa. Pengaruh antara IPM terhadap tingkat kriminalitas menunjukkan pengaruh negatif signifikan yang artinya semakin tinggi IPM maka tingkat kriminalitas semakin rendah begitu juga sebaliknya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunita (2021) bahwa IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap kriminalitas.

Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Ilham (2023), Sofia (2023), dan Marko (2023) yang menyatakan bahwa IPM berpengaruh positif terhadap kriminalitas. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dalam berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, dan harapan hidup yang layak semestinya Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi mampu menurunkan angka Kriminalitas suatu wilayah, namun faktanya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia masih tidak mampu menurunkan angka kriminalitas di wilayah Sumatera Selatan. Hal tersebut sejalan dengan yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jamaliah (2022) yang berjudul “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan dan Kejahatan di Kalimantan Barat, Indonesia” menyatakan hasil kejahatan menunjukkan hubungan positif dengan Indeks Pembangunan Manusia, artinya jika IPM turun 1 satuan maka korupsi akan meningkat.

Secara sistematis, kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 4 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Adapun hipotesis atau dugaan sementara pada penelitian ini adalah:

1. Diduga secara parsial Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan
2. Diduga secara parsial Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif terhadap pengangguran
3. Diduga secara parsial Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan
4. Diduga secara parsial Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif terhadap kriminalitas